

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2024

Andi Reski Lailatul Maulidan^{1*}, Diah Retno Dwi Hastuti², Syamsu Alam³,
Sri Astuty⁴, Abdul Rajab⁵

^{1*,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia.

Corresponding Email : areskilailatul@gmail.com^{1*}

Abstrak. Fenomena pertumbuhan ekonomi inklusif mencerminkan kualitas pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan data panel dari 24 kabupaten/kota selama periode 2010–2024, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Rasio Gini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara itu, IPM terbukti memiliki pengaruh positif, menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia merupakan kunci tercapainya pertumbuhan yang berkeadilan. TPT tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Koefisien determinasi pada penelitian ini ialah sebesar 0.7889 atau 78,89 persen kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sedangkan, sisanya 21,11 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; Kemiskinan; Ketimpangan; IPM; Pengangguran.

Abstract. The phenomenon of inclusive economic growth reflects the quality of regional development. This study aims to analyze the effect of poverty, income inequality (Gini ratio), Human Development Index (HDI), and Open Unemployment Rate (OUR) on inclusive economic growth in South Sulawesi Province. The data used is panel data from 24 districts/cities during the 2010–2024 period, sourced from the Central Statistics Agency and related agencies. The research method uses a quantitative approach, panel data regression analysis with a fixed effect model. The results show that poverty has no effect on inclusive economic growth, while the Gini ratio has a negative effect on inclusive economic growth. Meanwhile, HDI was found to have a positive effect, confirming that the quality of human development is key to achieving equitable growth. TPT has no effect on inclusive economic growth. The coefficient of determination in this study is 0.7889 or 78.89 percent of the ability of the independent variable to explain the dependent variable. Meanwhile, the remaining 21.11 percent is influenced by other factors outside the model.

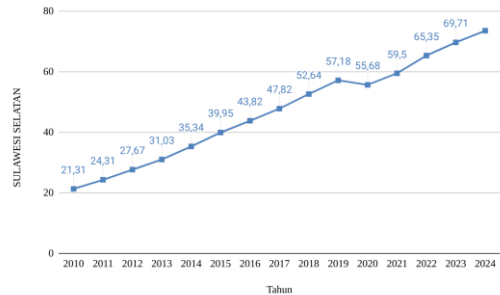
Keywords: Inclusive Economic Growth; Poverty; Inequality; HDI; Unemployment.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi sering kali diukur hanya melalui angka PDB, dengan fokus utama pada laju kemajuan tersebut. Isu-isu terkait pendapatan dan ketenagakerjaan menjadi ukuran utama dalam menilai kemajuan, namun pandangan ini terbatas karena tidak mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Kini, pembangunan ekonomi dianggap sebagai proses yang melibatkan transformasi mendasar pada struktur sosial, pola pikir masyarakat, dan kelembagaan negara, di mana selain mempercepat pertumbuhan, juga mengurangi ketimpangan dan kemiskinan (Todaro, 2015).

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan tersebut membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ketika perekonomian tumbuh, manfaatnya seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan cara ini, pertumbuhan yang inklusif tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran (Purwanti & Rahmawati, 2021). Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pertumbuhan inklusif melibatkan keterlibatan penuh seluruh anggota masyarakat, memastikan bahwa hasilnya dapat dirasakan oleh semua kalangan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah. Ali & Zhuang (2007) menambahkan bahwa tujuan utama dari pertumbuhan inklusif adalah menciptakan kesetaraan peluang bagi semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama pada mereka yang lebih miskin (Edison & Andriansyah, 2023). Ada beberapa indikator yang mengukur pertumbuhan inklusif, antara lain laju pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan yang rendah, ketimpangan yang semakin kecil, serta tingkat pengangguran yang menurun. Ide tentang pertumbuhan inklusif pertama kali diperkenalkan dalam rangka Tujuan Pembangunan Inklusif Millenium (MDGs). Fakta mendasar yang mendukung ide ini adalah

meskipun banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tetap lebar. Beberapa negara yang telah berhasil beralih dari sektor pertanian ke sektor industri masih menghadapi tantangan besar, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang semakin melebar (Tambunan *et al.*, 2024).



Gambar 1. Laju PDRB tahun 2010-2024

Kondisi ekonomi mulai menunjukkan pemulihan, dengan PDRB per kapita mencapai 59,50 juta pada tahun 2021. Angka ini terus meningkat menjadi 65,35 juta pada 2022 dan 69,71 juta pada 2023, menggambarkan peningkatan output ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakat. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan yang konsisten hingga 2024. Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil antara 2010 hingga 2024, terlihat dari peningkatan PDRB per kapita yang signifikan, dari 21,31 juta menjadi 73,57 juta. Namun, fenomena sosial-ekonomi yang menyertai pertumbuhan tersebut mencerminkan dinamika yang lebih kompleks. Salah satu contoh adalah fluktuasi kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan secara umum, tetap menunjukkan lonjakan pada periode tertentu, khususnya pada masa krisis, seperti saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat miskin masih rentan terhadap guncangan eksternal, yang menandakan bahwa fondasi pembangunan inklusif yang kuat belum sepenuhnya tercapai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2010 hingga 2024. IPM meningkat dari 66,00 pada 2010 menjadi 74,05 pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,6 hingga 0,7 poin.

Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun untuk mencapai kategori "sangat tinggi", diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam ketiga dimensi pembangunan manusia tersebut. Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, menunjukkan penurunan dari 0,425 pada 2014 menjadi 0,363 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Meskipun ada penurunan signifikan pada periode 2017-2019, Gini Ratio yang masih lebih tinggi dibandingkan angka 0,3 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tetap perlu diawasi. Penurunan Gini Ratio ini perlu dianalisis lebih lanjut, karena bisa saja terjadi bukan hanya karena peningkatan pendapatan kelompok miskin, tetapi juga karena stagnasi pada kelompok kaya. Hal ini perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait kualitas lapangan kerja dan mobilitas sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi signifikan dari 8,37% pada 2010 menjadi 5,10% pada 2014, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 2015-2019, TPT relatif stabil, dengan angka terendah tercatat pada 2019, yakni 4,62%, yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup sehat sebelum pandemi.

Namun, pada 2020, TPT melonjak menjadi 6,31% akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan PHK massal selama pandemi COVID-19. Pada 2021-2024, TPT menunjukkan penurunan secara bertahap hingga mencapai 4,19% pada 2024, menandakan pemulihan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi. Pertumbuhan ekonomi inklusif hanya dapat tercapai apabila ada peningkatan output ekonomi yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, perbaikan IPM, serta pengurangan ketimpangan pendapatan. Keempat variabel ini menjadi ukuran seberapa jauh pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat secara merata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus tidak hanya fokus pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pertumbuhan untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan

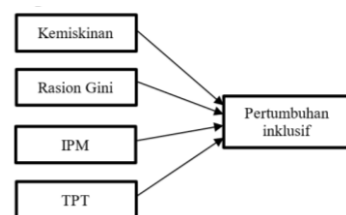
ekonomi jangka panjang. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, namun masih sedikit yang dapat mengatasi masalah perbedaan antar wilayah dalam data panel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang dipadukan dengan *Driscoll-Kraay standard errors* untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah kemiskinan, rasio Gini, IPM, dan TPT memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, yang melibatkan tiga hal utama: proses itu sendiri, output per kapita, dan jangka panjangnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diukur dengan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN).

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, yang pada gilirannya meningkatkan PDB atau PNB riil. Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif lebih dari sekadar pertumbuhan berbasis luas, melainkan harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, dari dimensi proses, yaitu memastikan semua pihak dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi. Kedua, dari segi hasil, di mana pertumbuhan tersebut mampu memberikan manfaat yang merata bagi semua kalangan. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi, mencakup seluruh sektor ekonomi. Hal ini berhubungan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro-poor, yang memastikan kelompok yang kurang diuntungkan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan konsep ini, pertumbuhan inklusif dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak

hanya memastikan pemerataan manfaat tetapi juga menurunkan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan inklusif fokus pada perluasan skala ekonomi, akses yang lebih luas terhadap aset ekonomi, serta penciptaan pemerataan peluang bagi generasi yang akan datang. Syarat utama untuk tercapainya pertumbuhan inklusif adalah mengurangi disparitas pendapatan antara pekerja sektor pertanian dan nonpertanian, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar (Sri Hartati, 2021). Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial-ekonomi yang bersifat multidimensional dan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan global. Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya diukur dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial (Todaro & Smith, 2012). Teori-teori kemiskinan yang telah dikembangkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penyebab dan cara mengatasinya. Teori klasik menganggap kemiskinan sebagai akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja dan keterbatasan modal yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga.

Dalam pandangan ini, pembangunan ekonomi dan akumulasi modal menjadi kunci pengurangan kemiskinan (Jhingan, 2004). Sebaliknya, teori struktural menekankan bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya, diskriminasi sosial, dan kelemahan institusi ekonomi dan politik, yang seringkali memperburuk ketimpangan sosial. Dalam perkembangannya, teori kapabilitas yang diajukan oleh Sen memberikan perspektif baru dalam memahami kemiskinan. Sen menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan individu dalam mencapai fungsi dasar kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih, dan partisipasi sosial (Sen, 1999). Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai kegagalan dalam memperluas kapabilitas manusia, bukan hanya sebagai kekurangan ekonomi. Ketimpangan adalah isu utama dalam kajian pembangunan ekonomi

dan sosial, karena mencerminkan distribusi yang tidak merata dari pendapatan, kekayaan, dan kesempatan dalam masyarakat. Secara umum, ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga dengan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya produktif, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi dan politik. Teori ketergantungan (*dependency theory*) menunjukkan bahwa ketimpangan di negara-negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh hubungan ekonomi global yang eksploitatif. Dalam pandangan ini, ketimpangan adalah akibat dari struktur ekonomi internasional yang menempatkan negara berkembang dalam posisi subordinat terhadap negara maju. Selain itu, teori kapital manusia (*human capital theory*) berpendapat bahwa ketimpangan sering muncul akibat perbedaan investasi pendidikan, keterampilan, dan pelatihan individu, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan pendapatan (Pyatt & Becker, 1966). Pengangguran adalah masalah sosial-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pembangunan. Secara umum, pengangguran terjadi ketika sebagian angkatan kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Teori Keynesian menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Meskipun upah fleksibel, pengangguran tetap ada karena rendahnya konsumsi dan investasi yang mengurangi permintaan tenaga kerja (Keynes, 1936). Teori pengangguran siklis menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi memengaruhi tingkat pengangguran. Ketika resesi terjadi, permintaan barang dan jasa menurun, perusahaan mengurangi produksi, dan terjadi PHK. Sebaliknya, pada ekspansi ekonomi, pengangguran menurun karena tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan.



Gambar 2. Kerangka konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menilai karakter pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada periode 2010-2024, khususnya terkait aspek inklusivitasnya. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa variabel kemiskinan, rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel, yaitu data yang menggabungkan dimensi cross-section dan time-series. Sampel penelitian terdiri dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan instansi terkait, sehingga keandalannya dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian adalah menganalisis pengaruh variabel kemiskinan, rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear

berganda pada data panel untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pengaruh masing-masing variabel secara simultan dalam konteks dinamika spasial dan temporal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam penelitian ini, analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independent yaitu kemiskinan, rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif. Prosedur analisis mencakup: (1) uji simultan (uji-F) untuk menilai pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen, (2) uji parsial (uji-t) untuk menguji kontribusi masing-masing variabel independen secara individual, dan (3) penghitungan koefisien determinasi (R^2) guna mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Hasil analisis tersebut disajikan sebagai berikut:

Table 1. Hasil Estimasi Model Terbaik

No	Pengujian	Prob. Value	Keterangan
1	Uji Chow	0.0000	Fixed Effect Model
2	Uji Hausman	0.0000	Fixed Effect Model
3	Uji Lagrange Multiplier (LM)	0.0000	Random Effect Model

Berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model Fixed Effect Model (FEM) sebagai estimasi yang paling tepat. Sebaliknya, uji Lagrange Multiplier (LM) merekomendasikan model Random Effect Model (REM). Mengingat dua dari tiga pengujian memilih FEM, model ini dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk penelitian ini. Setelah menentukan model FEM sebagai model terbaik, analisis regresi data panel dilakukan

dengan menggunakan koreksi Driscoll-Kraay standard errors guna mengatasi masalah heteroskedastisitas secara langsung. Proses analisis dijalankan dengan bantuan perangkat lunak Stata versi 17 untuk menguji pengaruh variabel Kemiskinan (X1), Rasio Gini (X2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (Y). Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Hubungan Variabel	Koefisien	t statistik	Prob.	VIF	Keterangan
C	-377.792	-11.96	0.000	-	-
X1	0.7105828	1.38	0.188	1.07	Tidak signifikan
X2	-17.72587	- 2.84	0.013	1.16	Signifikan
X3	5.801822	23.36	0.000	1.32	Signifikan
X4	0.2696776	0.64	0.534	1.42	Tidak signifikan

*) Signifikansi $\alpha = 5\%$

R2 = 0.7889

Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kemiskinan tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Koefisien regresi sebesar 0,7106 dengan nilai t-statistik 1,38 dan probabilitas 0,118 mengindikasikan adanya tren peningkatan tingkat kemiskinan yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, namun hubungan ini belum memenuhi kriteria signifikansi pada tingkat kepercayaan 95%. Secara konseptual, temuan ini bertentangan dengan prinsip dasar pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Dalam paradigma pembangunan yang mengedepankan inklusivitas, pengurangan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi idealnya harus mampu mendistribusikan manfaat secara merata, terutama kepada kelompok rentan dan berpendapatan rendah (Pratiwi & Kurniasari, 2023). Oleh sebab itu, pertumbuhan yang beriringan dengan peningkatan kemiskinan menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan keberlanjutan pembangunan tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh karakteristik struktural perekonomian Sulawesi Selatan, di mana sektor informal masih mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat. Kelompok miskin banyak berperan dalam sektor informal yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meskipun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan belum signifikan. Transformasi pengurangan kemiskinan menjadi pertumbuhan yang inklusif masih berjalan lambat. Faktor-faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja produktif bagi kelompok miskin, serta ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah menjadi hambatan

utama. Studi Aisyah *et al.* (2023) menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh struktur sektor ekonomi dan kebijakan distribusi. Pertumbuhan tinggi tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan tanpa kebijakan yang secara spesifik menasar kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan temuan Cahyo Nugroho & Toni Taruno (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu pro-poor jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi. Meskipun secara statistik terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan pertumbuhan, hasil ini belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif. Sebaliknya, kondisi ini mengindikasikan potensi pertumbuhan yang eksklusif atau bahkan memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak disertai strategi pengentasan kemiskinan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat akses ekonomi, pendidikan, dan jaminan sosial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berdampak nyata bagi kelompok miskin. Pendapat ini juga didukung oleh Nasution (2019), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berhasil menurunkan kemiskinan, terutama di daerah tanpa strategi distribusi pembangunan yang adil. Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan yang inklusif memerlukan kebijakan distribusi pendapatan yang berorientasi pada pemerataan.

Pengaruh Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel Rasio Gini memiliki koefisien sebesar -17,72587 dengan nilai t-statistik -2,84 dan probabilitas 0,013. Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan secara signifikan

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, semakin rendah kecenderungan pertumbuhannya untuk bersifat inklusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara kuat bahwa ketimpangan memiliki pengaruh nyata selama periode pengamatan. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan kerangka Inclusive Growth Framework dari World Bank (2009) dan OECD (2018), yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat disebut inklusif apabila manfaatnya tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan sebagian besar hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok menengah dan miskin mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan. Penelitian Wibowo (2017) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa tingginya ketimpangan di Indonesia menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan inklusif, karena kelompok berpendapatan rendah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk berkontribusi dalam ekonomi formal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di banyak daerah berlangsung tanpa pengurangan ketimpangan yang signifikan, sehingga dampak pembangunan tidak dirasakan secara merata. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak negatif ketimpangan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, perbaikan sistem jaminan sosial, dan perluasan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil regresi, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Koefisien regresi sebesar 5,801822 dengan nilai t-statistik 23,36 dan probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu

satuan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen. Pengaruh ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia merupakan faktor penentu utama dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif. IPM merupakan indikator komposit yang mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dalam konteks pertumbuhan inklusif, ketiga aspek ini sangat penting karena mencerminkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Secara teoritis, Maharani *et al.* (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif harus didukung oleh perbaikan akses dan mutu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, dapat mengakses peluang ekonomi. Peningkatan IPM memungkinkan terbentuknya tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan produktif yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Wilayah dengan IPM tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat sekaligus merata. Peningkatan pembangunan manusia menjadi pendorong utama agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok elit, melainkan juga menjangkau masyarakat luas. Hal ini diperkuat oleh Kristyanto & Kaluge (2018) yang menyatakan bahwa IPM merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan inklusif, karena pertumbuhan tanpa dukungan pembangunan manusia cenderung menghasilkan ketimpangan. Hasil empiris ini menegaskan bahwa peningkatan IPM tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga berperan penting dalam memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan daerah, terutama untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,2697$, dengan nilai t -statistik $0,64$ dan probabilitas $0,534$. Meskipun arah hubungan negatif, hasil ini belum signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% . Temuan ini sejalan dengan teori Hukum Okun (Okun, 1962) yang menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran biasanya diikuti oleh peningkatan output, dan sebaliknya. Namun, koefisien negatif yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh rigiditas pasar tenaga kerja atau ketimpangan kualitas pekerjaan, sehingga peningkatan output tidak selalu diiringi dengan penurunan pengangguran formal. Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja di suatu wilayah, di mana tingginya pengangguran menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif belum terserap dalam aktivitas ekonomi formal yang berkontribusi terhadap pertumbuhan. Dalam daerah berkembang seperti Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran yang rendah belum tentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama jika sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah. Sektor informal seringkali kurang tercatat secara akurat dalam statistik ketenagakerjaan resmi, sehingga angka TPT yang rendah dapat menutupi keberadaan ketenagakerjaan semu (*pseudo-employment*) yang kurang produktif.

Temuan ini didukung oleh penelitian Muslihatinningsih & Abidin (2022) yang menyatakan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia Timur, pengangguran tidak selalu menjadi variabel signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi lokal yang masih bergantung pada sektor informal. Oleh karena itu, rendahnya signifikansi statistik variabel TPT dalam model ini bukan berarti pengangguran tidak penting, melainkan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk memahami kualitas ketenagakerjaan, termasuk jenis pekerjaan, produktivitas, dan upah layak. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang benar-benar

inklusif, upaya pengurangan pengangguran saja tidak cukup. Pemerintah daerah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif, formal, dan layak, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata serta mendistribusikan manfaat pertumbuhan secara merata.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Selatan. Temuan tersebut sejalan dengan studi Aisyah *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh struktur sektor ekonomi serta kebijakan distribusi pembangunan. Di daerah dengan dominasi sektor informal seperti Sulawesi Selatan, peningkatan pendapatan kelompok miskin belum cukup untuk mendorong pertumbuhan yang merata, sebagaimana juga dikemukakan oleh Cahyo Nugroho dan Toni Taruno (2021). Mereka menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpihak pada kelompok miskin jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kalangan atas. Oleh sebab itu, meskipun secara statistik terdapat hubungan positif, hal tersebut belum dapat dianggap sebagai indikator pertumbuhan yang adil dan merata. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui Rasio Gini, menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.

Hal ini sesuai dengan pandangan World Bank (2009) dan OECD (2018) yang menyatakan bahwa ketimpangan tinggi menyebabkan manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara mayoritas tidak merasakan perbaikan kesejahteraan. Wibowo (2017) juga menegaskan bahwa ketimpangan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan dan memperluas akses terhadap layanan dasar sangat diperlukan agar pertumbuhan dapat dirasakan secara luas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif, menegaskan pentingnya kualitas sumber daya

manusia untuk memperkuat pembangunan. Maharani *et al.* (2024) menekankan bahwa peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan mendukung terciptanya tenaga kerja yang produktif dan sehat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Penelitian Kristyanto dan Kaluge (2018) juga menunjukkan bahwa IPM menjadi faktor utama agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit, tetapi juga menjangkau masyarakat lapisan bawah. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kondisi ini mungkin terkait dengan dominasi sektor informal di wilayah tersebut, di mana angka pengangguran resmi belum tentu mencerminkan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh. Muslihatinningsih dan Abidin (2022) menyatakan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia Timur, pengangguran tidak selalu menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor informal. Oleh karena itu, pengurangan pengangguran formal saja tidak cukup tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan dan produktivitas agar manfaat pertumbuhan dapat tersebar secara merata. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Kebijakan yang hanya fokus pada peningkatan output tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut berpotensi menghasilkan pertumbuhan yang tidak merata dan kurang berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pendekatan pembangunan yang menyatukan berbagai aspek tersebut menjadi langkah yang lebih tepat untuk mencapai hasil yang adil dan menyeluruh, sebagaimana didukung oleh berbagai studi terkait.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) terhadap

pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan data panel dari 24 kabupaten/kota selama periode 2010-2024. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, secara parsial, kemiskinan dan TPT tidak berpengaruh signifikan, sementara Rasio Gini dan IPM memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan inklusif di wilayah tersebut. Koefisien determinasi sebesar 0,7889 mengindikasikan bahwa sekitar 78,89 persen variasi pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait periode pengamatan dan belum membedakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari variabel yang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan dengan model dinamis untuk menangkap hubungan dua arah dan efek waktu antar variabel. Meski demikian, temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis produktivitas, pemerataan akses ekonomi, serta perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh hubungan antara ketimpangan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi: Sebuah perspektif dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>.
- Cahyo Nugroho, Y., & Toni Taruno, H. (2021). Analisis pro-poor growth Kabupaten Pekalongan: Profil dan dekomposisi kemiskinan 2015-2019. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 5(01), 1–10.
<https://doi.org/10.54687/jurnalkajen501>.

- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>.
- Jhingan, L. M. (2004). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Press.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pembiayaan investasi modal manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 170. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11i02.p04>.
- Maharani, F., Nora, A., Sari, D., & Pane, P. Y. A. (2024). Program peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 767–772. <https://doi.org/10.59837/q03v9r35>.
- Muslihatinningsih, F., & Abidin, J. (2022). Analisis kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.19184/jek.v6i2.33217>.
- Nasution, Z. (2019). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v1i2.20>.
- Pratiwi, K. D., & Kurniasari, D. (2023). Penerapan model panel: Determinan tingkat pertumbuhan inklusif Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 60–78. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.163>.
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.231>.
- Pyatt, G., & Becker, G. S. (1966). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. *The Economic Journal*, 76(303), 635. <https://doi.org/10.2307/2229541>.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>.
- Sukirno, S. (2011). *Makro ekonomi teori pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, B. A. Y., Darayani, F., & Harahap, I. (2024). Hubungan antara fertilitas, mortalitas dan migrasi terhadap laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 432–441. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.2885>.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan pendapatan dan middle income trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>.